

**KINERJA BHABINKAMTIBMAS DALAM PENERAPAN
PERPOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM
POLSEK LENGKONG KOTA BANDUNG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir
Pada Program Studi D-III Kepolisian**

Oleh :

AKBAR NUR ALAMSYAH

NPM : 41153040170030



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2020

**PERSETUJUAN BIMBINGAN
TUGAS AKHIR**

**KINERJA BHABINKAMTIBMAS DALAM PENERAPAN PERPOLISIAN
MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLSEK LENGKONG KOTA
BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
Kepolisian Program D-III Kepolisian Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh :

**AKBAR NUR ALAMSYAH
NPM : 41153040170030**

Bandung, Oktober 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si.
NIK. 87012

Ivonne K. Permana, S.H., M.H.
NIK. 101313

Mengesahkan
Dekan Fisip

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Tati Sarihati Dra.M.Si.
NIK. 20389

Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si.
NIK. 87012

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKBAR NUR ALAMSYAH**

NPM : **41153040170030**

Judul Tugas Akhir : **KINERJA BHABINKAMTIBMAS DALAM
PENERAPAN PERPOLISIAN MASYARAKAT DI
WILAYAH HUKUM POLSEK LENGKONG KOTA
BANDUNG**

Menyatakan bahwa segala yang tertuang dalam Tugas Akhir ini, adalah betul-betul ide dan hasil pemikiran asli dari penulis. Bukan plagiat atau hasil meniru ide, hasil pemikiran atau buah karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan penulis tidak benar, maka saya bersedia menerima segala sanksi hukum yang diberikan, dari pihak akademik maupun pihak yang berwenang tanpa melibatkan siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan

AKBAR NUR ALAMSYAH
41153040170030

ABSTRACT

This research aims to understand the performance that has been carried out by the police, especially Bhabinkamtibmas in the application of community policing and what factors are the supporters and obstacles in the application of policing, as well as what efforts can be made to improve the performance of Bhabinkamtibmas in the application of community policing in the jurisdiction of Lengkong Police in Bandung City.

This research was conducted at the Lengkong Police, Bandung City. The method used in this research is descriptive analysis method, data sources are obtained through primary data and secondary data, and data collection techniques through observation and interviews.

The results showed that the performance of Bhabinkamtibmas in implementing community policing through various activities such as carrying out guidance and appeals for security and order to the community, maximizing security and night patrol activities, implementing early detection and early warning were already running well but not yet optimal. The supporting and inhibiting factors for Bhabinkamtibmas in the implementation of community policing are supporting factors such as support, participation, and public concern for the police to maintain and maintain public security and order, while the inhibiting factors are lack of infrastructure to support and improve Bhabinkamtibmas duties. Efforts have been made such as maximizing visits to the community with a program door to door to improve the application of community policing in the jurisdiction of the Lengkong Police, Bandung City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas dalam penerapan perpolisian masyarakat dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan perpolisian, Serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam penerapan perpolisian masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Lengkong Kota Bandung. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bhabinkamtibmas dalam penerapan perpolisian masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti, melaksanakan pembinaan dan himbauan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, memaksimalkan kegiatan siskamling atau ronda malam, melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Adapun faktor pendukung dan penghambat Bhabinkamtibmas dalam penerapan perpolisian masyarakat yaitu, faktor pendukungnya seperti adanya dukungan, partisipasi, dan kepedulian masyarakat terhadap kepolisian untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan dalam faktor penghambatnya seperti kurangnya sarana prasarana untuk mendukung dan meningkatkan tugas Bhabinkamtibmas. Adapun upaya yang dilakukan seperti memaksimalkan kunjungan kepada masyarakat dengan program *door to door* untuk meningkatkan penerapan perpolisian masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir, sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir pada program program studi Ilmu Kepolisian Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Tidak lupa penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn.) Dr. H. R.AR. Harry Anwar, S.H. M.H, Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
4. Bapak Yusef Wandu, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaann Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

6. Ibu Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si, Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dan selaku Pembimbing Utama, yang juga telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak Dedi Rahmat, S.Ip, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Ivone K. Permana, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama proses belajar.
10. Instansi Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung dan Jajarannya Khususnya Unit Binmas dan Reskrim yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikiran dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terima kasih kepada kedua orang tuaku Cuciwati Sentrianti dan Aml. Ade Senjaya beserta Keluarga Besar, yang telah memberikan doa, bimbingan, nasehat, dukungan materiil dan moral dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Terima kasih kepada rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan IX, X dan XI yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Terima kasih kepada Risca Tri Octaviani yang telah menemani dan memberikan dukungan moril, doa serta motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Terimakasih kepada adikku Febrianti Putri Pamungkas yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Terimakasih kepada pamanku Asep Komala yang telah memberikan doa, nasehatan, dukungan materiil dan moril dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari dalam pembuatan tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda.

Bandung, Oktober 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Maksud Peneliti	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Ruang Lingkup Kinerja	11
2.1.1 Pengertian Kinerja	11
2.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja	12
2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja	14
2.1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja	15
2.1.5 Indikator Pengukuran Kinerja	16
2.2 Ruang Lingkup Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Bhabinkamtibmas)	19
2.2.1 Pengertian Bhabinkamtibmas.....	19
2.2.2 Fungsi-Fungsi Bhabinkamtibmas	20
2.2.3 Tugas Pokok dan Wewenang Bhabinkamtibmas	21

2.3	Ruang Lingkup Pemolisian Masyarakat (Polmas)	22
2.3.1	Pengertian Perpolisian Masyarakat	22
2.3.2	Prinsip-Prinsip Perpolisian Masyarakat	23
2.3.3	Fungsi Polmas	25
2.3.4	Strategi dan Sasaran Polmas	25
2.3.5	Pengertian Masyarakat	27
2.3.6	Proses Terbentuknya Masyarakat	29
2.3.7	Ciri-ciri Masyarakat	30
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Metode Penelitian	33
3.2	Desain Penelitian	33
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.3.1	Sumber Data	34
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data	36
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Tempat Penelitian	39
4.1.1	Letak Geografis Polsek Lengkong Kota Bandung	39
4.1.2	Kependudukan Wilayah Hukum Polsek Lengkong	39
4.1.3	Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung	43
4.1.4	Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung	45
4.2	Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung	47
4.3	Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung	57
4.3.1	Faktor Pendukung	58
4.3.2	Faktor Penghambat	61

4.4 Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.....	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	66
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian Pada Bulan April s/d Agustus 2020.....	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lengkong	40
Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Kejahatan di Polsek Lengkong Kota Bandung Tahun 2019, 2019, Januari s/d Agustus 2020	51
Tabel 4.3 Laporan Kegiatan Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung Tahun 2018	52
Tabel 4.4 Laporan Kegiatan Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung Tahun 2019	52
Tabel 4.5 Laporan Kegiatan Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung Tahun 2020	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung	43
Gambar 4.2 Peta Ploting Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung	43
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumen Kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Lengkong Kota
 Bandung
- Lampiran 2 Dokumen Kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Lengkong Kota
 Bandung
- Lampiran 3 Dokumen Kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Lengkong Kota
 Bandung
- Lampiran 4 Dokumen Kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Lengkong Kota
 Bandung
- Lampiran 5 Surat Observasi
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat . Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU No. 2 Tahun 2002), dijelaskan bahwa Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia.

Anggota Polri khususnya yang berada di wilayah hukum Polsek Lengkong Polrestabes Bandung dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan dengan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, human trafficking, cyber crime dan lain-lain. Selain kasus tersebut konflik-konflik kedaerahan juga merupakan ancaman yang perlu diperhatikan, seperti isu SARA, daerah yang ingin memerdekakan diri, unjuk rasa anarkis, perkelahian antar suku, perusakan tempat ibadah,

dan lain-lain. Beberapa kasus di atas muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang muncul pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan Polri, belum menjadi sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Polri membutuhkan adanya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat.

Menyadari pentingnya suatu kerjasama Polri dengan masyarakat, maka Polri mulai menerapkan suatu program yang dinamakan Program Perpolisian Masyarakat. Sebelum konsep perpolisian masyarakat diterapkan, tugas dan peran kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum dilakukan secara konvensional (tradisional), yaitu polisi dianggap hanya bertugas untuk menangkap penjahat dengan cara-cara yang sifatnya represif. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai alat pemegang otoritas, dan institusi kepolisian dipandang sekedar alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan lebih banyak mewarnai pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam perpolisian tradisional, peran polisi hanya terbatas pada respon atas kejadian yang diterimanya saja tidak diperluas hingga upaya pengidentifikasian serta penyelesaian masalah di masyarakat dan yang paling utama, dalam perpolisian tradisional polisi bersifat reaktif terhadap kejadian. Akibatnya, muncullah berbagai peristiwa tragis di tengah-tengah masyarakat seperti, polisi menembak warga sipil yang tidak berdosa, penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, serta perlakuan-

perlakuan buruk lainnya yang mengarah pada pelanggaran HAM. Ini semua menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menjadi menurun.

Pada dasarnya, proses lahirnya Perpolisian Masyarakat di lingkungan Polri adalah menyempurnakan konsep, kebijakan, dan praktik pembinaan masyarakat, terutama yang dilakukan oleh para Babinkamtibmas, yang telah berlangsung lama di lingkungan Polri. Namun, demikian praktik masyarakat sebagai mitra sejajar Polri dalam memecahkan masalah merupakan hal baru.

Perpolisian Masyarakat menciptakan pola hubungan dan peran baru antara polisi dan masyarakat. Tentu saja, dalam konteks ini kedua belah pihak perlu melakukan perubahan dasar. Polisi tidak dapat bekerja sendiri karenanya harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat. Polisi juga bahu membahu dan membuat keputusan bersama untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.

Akhirnya melalui proses uji coba, dan pembentukan model yang dimotori oleh berbagai lembaga donor, seperti IOM, JICA/Jepang, Asian Foundation, Partnership, dan UNHCR, pada tanggal 13 Oktober 2005, dengan Keputusan Kapolri No. Pol Skep/737/X/2005 secara resmi Perpolisian Masyarakat menjadi kebijakan yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Polri.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat bahwa Perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.¹

Dengan berbekal Skep tersebut, Bagian Bina Mitra menjadi ujung tombak kemitraan dengan masyarakat. Polri di tingkat Polres, merancang dan mendesain kegiatan Perpolisian Masyarakat dengan merangkul berbagai lapisan masyarakat, secara kewilayahan maupun sektoral. Terbentuknya sejumlah Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan wadah bertemunya aparat kepolisian dan masyarakat dalam ruang yang mengedepankan kebersamaan baik dalam pembahasan maupun tindakan. Tidak melulu dalam soal Kamtibmas, tetapi dalam isu-isu sosial lainnya. FKPM dalam proses berikutnya, tidak mesti melembaga bernama FKPM, tetapi bisa menggunakan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang sudah ada, semisal Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, warga siaga dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan penerapan Perpolisian Masyarakat di tengah-tengah masyarakat, maka dibentuk suatu unit yang dinamakan Bhayangkara

¹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat

Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/8/XI/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol : Bujuklap/17/VIII/1997 tentang Bintara Polri pembina kamtibmas dikelurahan/desa dan Surat Kapolri Nomor : B/3377/IX/2011 tanggal 29 september dijelaskan bahwa Bhabinkantibmas merupakan community officer (Petugas Polmas) yang berperan sebagai fasilitator beroperasinya Perpolisian Masyarakat dan sekaligus penghubung antara keputusan Polri dan komunitas setempat.²

Bhabinkamtibmas sendiri merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Hal tersebut seperti tertulis dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Unit Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polsek yang berada di bawah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Bhabinkamtibmas ditempatkan pada desa/kelurahan. Permasing desa/kelurahan, ditempatkan 1 (satu) personil/aparat. Bhabinkamtibmas sebagai salah satu ujung tombak dalam penerapan Perpolisian Masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat. Sehingga kedepannya polisi dan masyarakat secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problematika pada masyarakat dan juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi masalah

² Kapolri No. Pol : Bujuklap/17/VIII/1997 tentang Bintara Polri pembina kamtibmas dikelurahan/desa.

ditengah masyarakat serta mampu memelihara kamtibmas. Bhabinkamtibmas berperan pula menjadi mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah.

Dengan program Perpolisian masyarakat ini, diharapkan bukan saja masyarakat hanya bertindak bila timbul kejahatan atau pelanggaran hukum, namun polisi juga harus mampu bertindak lebih awal lagi dalam menangani akar-akar kejahatan dan pelanggaran hukum. Ini berarti bahwa aktivitas polisi harus menyentuh tataran-tataran Pre-emptif, Preventif sampai pada tataran Refresif. Polri saat ini harus menjadi sebuah lembaga negara yang benar-benar menjadi representasi masyarakat dan memiliki pola tindakan dan fungsi sebagai control sosial, paradigma kemitraan, partisipatif, professional, kesadaran (tidak dengan mengedepankan cara pemaksaan) dan komunitas (tidak individualis).

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi yang berada di Jawa Barat , kota ini merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Selayaknya pusat pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat dominan berada di kota ini. Oleh karena itu, kondisi Kamtibmas di kota ini harus benar-benar terjaga agar segala jenis aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan KEP KAPOLRI nomor : KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Validasi Polresta, kini Polrestabes Bandung jajaran ada 28 Polsek dan 1 Sub Sektor dan salah satunya adalah Polsek Lengkong.

Polsek Lengkong khususnya Unit Binmas dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas yaitu dengan upaya menjalin hubungan yang baik, melaksanakan pengamanan dan pendekatan dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong. Upaya tersebut sesuai dengan yang diperintahkan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang sistem Keamanan Lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui model Perpolisian Masyarakat (POLMAS) harus di kembangkan dengan mengutamakan upaya-upaya mencegah dan menangkal bentuk-bentuk ancaman gangguan Kamtibmas.

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Polsek Lengkong
Tahun 2018-2020

Data Tindak Pidana per Tahun					
2018		2019		2020	
CT	CC	CT	CC	CT	CC
74	85	78	76	41	53

Sumber : Rekrim Polsek Lengkong Kota Bandung, 2020

Keterangan :

CT : Crime Total

CC : Crime Clearance

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari Polsek Lengkong Kota Bandung untuk menggambarkan situasi Kamtibmas dari tahun 2018 sampai dengan 2020 bahwa jumlah Tindak Pidana yang dilaporkan dari tahun 2018 sebanyak 74 kejahatan yang ditangani (Crime Total) dan 85 kejahatan yang terungkap (Crime Clearance). Pada tahun 2019 Tindak Pidana dilaporkan 78 kejahatan yang ditangani (Crime Total) dan 76 kejahatan

yang terungkap (Crime Clearance), Sedangkan pada tahun 2020 terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan agustus Tindak Pidana terlapor sebanyak 41 kejadian yang ditangani (Crime Total) dan 53 kejahatan yang terungkap (Crime Clearance) di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Dari data tersebut peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian untuk dapat mengetahui kinerja atau upaya seperti apa yang telah dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas khususnya dalam penerapan Polisi Masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung sehingga dapat meminimalisir kenaikan tingkat kejahatan pada setiap tahunnya, terlihat dari Tindak Pidana yang terlapor dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu mengalami kenaikan namun tidak signifikan dan pada tahun 2020 dari bulan januari sampai dengan bulan Agustus jumlah Tindak Pidana terlapor masih relatif cukup jauh dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Polisi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polrestaes Bandung sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Polisi Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Penerapan Polisi Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.
2. Untuk memahami faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Penerapan Polisi Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yang meliputi :

1. Secara Teoris, Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dimasa mendatang khususnya dalam pengembangan Ilmu Kepolisian yang berkaitan dengan tugas Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat.
2. Secara praktis, Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

3. Secara Akademis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan fakultas sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan serta memperkaya karya tulis dalam berbagai bidang penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja adalah sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; kemampuan kerja.

Pengertian kinerja dikemukakan oleh Bastian dalam Tangkilisan (2005:175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut.³ Senada dengan pendapat Bastian, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy dalam Keban (2004:193), juga menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.⁴

Menurut Wibowo (2011:7) kinerja berasal dari pengertian performance.⁵ Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai

³ Bastian Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.

⁴ Keban, Yeremias T, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media

⁵ Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Sedangkan menurut Riani (2013:61) mengatakan bahwa kinerja adalah *job performance* / kinerja adalah tingkat produktivitas seorang karyawan, relatif pada rekan kerjanya, pada beberapa hasil dan perilaku yang terkait dengan tugas. Kinerja dipengaruhi oleh variabel yang terkait dengan pekerjaan meliputi *role stress* dan konflik kerja/non kerja.⁶

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kinerja diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan bagian dari organisasi untuk mencapai tujuan bersama, sehingga tujuan dari kinerja akan menghasilkan organisasi yang berprestasi dengan kriteria keberhasilan berupa tujuan-tujuan atau target tertentu yang hendak di capai dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan secara efektif.

2.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja

Pasolong (2007:182), mengatakan bahwa pengukuran kinerja pada dasarnya di gunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi

⁶ Asri Laksmi Riani. 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia Masa Kini*, Graha Ilmu. Yogyakarta.

instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.⁷

Menurut Gary Dessler dalam Pasolong (2007:182), juga menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada di atas rata-rata. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah menilai hasil kerja organisasi publik sudah tercapai atau belum sehingga tujuan yang di capai akan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh organisasi publik tersebut.⁸

Sedangkan menurut Dwiyanto (2012:47), penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.⁹ Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi

⁷ Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.

⁸ Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung

⁹ Agus Dwiyanto. 2012 (Jilid Dua). *Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja, maka benchmarking dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan suatu organisasi untuk menilai kinerja yang telah dilaksanakan sudah sesuai dan mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kinerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Nasucha dalam Pasolong (2011:185), mengatakan bahwa hasil dari pengukurankinerja dapat digunakan untuk menentukan beberapa hasil antara lain :

- a. Menentukan bahwa ketunggan dan pengaruh yang sedang berjalan dapat dicapai,
- b. Memperoleh jaminan bahwa tujuan dapat dan sedang dicapai,
- c. Memonitor dan mengontrol perkembangan dari rencana yang ditetapkan,
- d. Memastikan penggunaan sumber-sumber daya,
- e. Menilai efektivitas dari sebuah aktivitas,

- f. Menyediakan sebuah dasar untuk menghitung penghargaan dan insentif, dan
- g. Menentukan bahwa value for money dapat diperoleh¹⁰.

Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo dalam Sinambela (2012:187) mempunyai tiga tujuan, yaitu :

- a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja,
- b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.¹¹

2.1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Mahsun (2006:33), menyatakan bahwa sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Manfaat pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006:33), antara lain :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja,

¹⁰ Pasolong, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.

¹¹ Sinambela, Lijan Poltak, dkk. (2012). *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati,
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja,
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati,
- e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja,
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi / pemerintah,
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif,
- i. Menuju peningkatan yang perlu dilakukan, dan
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.¹²

2.1.5 Indikator Pengukuran Kinerja

Dalam Mahsun (2006:71) menerangkan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.¹³ Dwiyanto

¹² Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

¹³ Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

dalam Pasolong (2011:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

- a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antar input dan output.
- b. Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang berbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
- c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

- e. Akuntabilitas, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.¹⁴

Mahsun (2006:196) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sebagai berikut:

- a. Indikator inputs (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, bahan, kebijakan, waktu dll, dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan organisasi. Indikator ini lebih terukur, akan tetapi indikator ini tidak akan menunjukkan data dan informasi yang akurat, jika dalam proses pengukuran dilakukan sembarangan.
- b. Indikator Proses melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang mana masukan-masukan yang ada diolah menjadi barang dan jasa sebagai kinerja untuk publik.
- c. Indikator Outputs (keluaran) menunjukkan hasil kerja apakah berupa barang atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses.
- d. Indikator Outcomes (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang diperoleh dari keluaran suatu kegiatan.

¹⁴ Pasolong, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.

- e. Indikator Benefits (manfaat) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat suatu kegiatan baru bisa diketahui dalam jangka menengah atau jangka panjang, yang mana hasil tersebut dipergunakan secara tepat waktu dan berfungsi penuh.
- f. Indikator Impact (dampak) menggambarkan dampak yang diperoleh dari indikator manfaat.¹⁵

2.2 Ruang Lingkup Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

2.2.1 Pengertian Bhabinkamtibmas

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Perpolisian Masyarakat di desa/kelurahan.¹⁶

¹⁵ Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

¹⁶ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang *Perpolisian Masyarakat*.

2.2.2 Fungsi-Fungsi Bhabinkamtibmas

Pada Pasal 26 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, dijelaskan bahwa fungsi-fungsi Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi / persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyalurkan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi,

motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.¹⁷

2.2.3 Tugas Pokok dan Wewenang Bhabinkamtibmas

Tugas pokok Bhabinkamtibmas menurut Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015 Pasal 27 adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah.
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.

¹⁷ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang *Perpolisian Masyarakat*.

- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.¹⁸

Selain tugas pokok tersebut, menurut Pasal 28 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015 wewenang dari Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut : menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dan mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

2.3 Ruang Lingkup Pemolisian Masyarakat (Polmas)

2.3.1 Pengertian Perpolisian Masyarakat

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, pemolisian masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban

¹⁸ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang *Perpolisian Masyarakat*.

Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Perpolisian Masyarakat

Menurut Pasal 3 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, Polmas dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban,
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/ penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban,
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain,

- e. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif,
- f. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan,serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri,
- g. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis,
- h. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian, dan
- i. Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.¹⁹

¹⁹ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang *Perpolisian Masyarakat*.

2.3.3 Fungsi Polmas

Fungsi Polmas menurut Pasal 5 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, antara lain :

- a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas,
- b. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas,
- c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas, dan
- d. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

2.3.4 Strategi dan Sasaran Polmas

Menurut Pasal 6 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, strategi Polmas dilaksanakan melalui :

- a. Kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas,
- b. Pemecahan masalah,
- c. Pembinaan keamanan swakarsa,
- d. Penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional,
- e. Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat,

- f. Bimbingan dan penyuluhan,
- g. Patroli dialogis,
- h. Intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas,
- i. Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian,
dan
- j. Kerja sama bidang Kamtibmas.²⁰

Sedangkan Sasaran Polmas, menurut Pasal 7 Perkap Kapolri No. 3

Tahun 2015 meliputi:

- a. Kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri,
- b. Kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungannya,
- c. Kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya,
- d. Kesadaran hukum masyarakat,
- e. Partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya, dan
- f. Gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

²⁰ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang *Perpolisian Masyarakat*.

2.3.5 Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Definisi lain Menurut (Koentjaraningrat, 2009: 115-118) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- 1) Interaksi antar warga-warganya,
- 2) Adat istiadat,
- 3) Kontinuitas waktu,
- 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga ²¹

Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006:22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. ²²

²¹ Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

²² Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (1984: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.²³

Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (1994: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim (1994: 29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip

²³ Linton, Ralph. 1984. Antropologi, Suatu Penyelidikan Tentang Manusia. Bandung: Jemmars.

fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat.²⁴ Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

2.3.6 Proses Terbentuknya Masyarakat

Proses terbentuknya suatu masyarakat biasanya tanpa disadari, karena hal ini memang merupakan sebuah sifat manusia yang membutuhkan orang lain (*zoon social*), hal ini diikuti oleh seluruh kelompok masyarakat. Secara ilmu sosiologi, proses terbentuknya suatu masyarakat adalah :

1. Akibat adanya pemenuhan biologis baik itu sandang, pangan dan papan yang akan sangat susah untuk dilengkapi jika hidup secara Individual, maka dalam penyelenggaraannya akan mudah dilakukan secara bersama-sama.

²⁴ Durkheim, Emile. Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Erlangga, 1994

2. Kemungkinan untuk bersatu dengan manusia yang lain.
3. Keinginan untuk bersatu dengan lingkungannya.
4. Dengan terbentuknya suatu masyarakat, maka ancaman-ancaman akan lebih berkurang, dan dapat mempertahankan diri dalam menghadapi kekuatan alam binatang, atau kelompok lain yang lebih besar.
5. Manusia memiliki ciri sebagai makhluk hidup yang melakukan reproduksi maka dalam satu keluarga secara alami sudah terbentuk suatu masyarakat kecil.

Manusia mempunyai kecenderungan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain untuk memperluas wawasan dan pengetahuan.

2.3.7 Ciri-ciri Masyarakat

Menurut Abdul Syani dalam Basrowi (2005 :41) menyebutkan bahwa masyarakat ditandai oleh empat ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.²⁵ Sedangkan Soerjono Soekanto (2006: 156-157) menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk

²⁵ Basrowi, 2005. Pengantar sosiologi, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.

- b. Bercampur untuk wilayah yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, kesan-kesan atau perasaan perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar merupakan sebuah kesatuan.
- d. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.²⁶

Sedangkan Menurut Munandar Soelaman (1992:73) ciri-ciri masyarakat ialah adanya sejumlah orang, tinggal dalam suatu daerah tertentu, adanya sistem hubungan, ikatan atas dasar kepentingan bersama, tujuan dan bekerja bersama, ikatan atas dasar unsur-unsur sebelumnya, rasa solidaritas, sadar akan adanya interdependensi, adanya norma-norma dan kebudayaan.²⁷

²⁶ Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

²⁷ Soelaeman, Munandar. 2009. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dari ciri-ciri masyarakat diatas selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan oleh para ahli bahwa masyarakat adalah kelompok manusia mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Menurut Yesmil Anwar, S.H., M.H., (2017:173-174) ada tiga jenis masyarakat dari lingkungan hidupnya, yaitu :

1. Masyarakat primitif, yaitu masyarakat yang terisolir atau mengisolasi diri dengan dunia atau masyarakat luar cara hidupnya makin terbelakang, kebutuhannya makin sederhana, kebutuhannya masih rendah serta tempat tinggalnya pun berpindah-pindah dalam (nomaden).
2. Masyarakat desa, yaitu masyarakat yang agraris yang kebutuhan hidupnya banyak bergantung dari hasil bertani dan menangkap ikan, kehidupan mereka sangat bergantung kepada iklim dan pergantian musim. Hubungan antar individu bersifat primer dan sifat kegotongroyongan yang cukup kuat.
3. Masyarakat kota, yaitu masyarakat yang merupakan tempat berbaurnya segala macam suku bangsa dan bertumpunya hasil-hasil teknologi modern. Setiap individu selalu berlomba memenuhi kebutuhan hidupnya, sifat-sifat individualitas segera tumbuh dan berkembang di masyarakat kota

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil adalah metode deskriptif analisis. Metode ini menurut Sugiyono (2008:105) adalah Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁸

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan suatu rancangan yang dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam pengertian yang luas desain penelitian mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, hingga analisis data.

Menurut Moh. Nazir (2009:84) Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.²⁹

Desain penelitian membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti yang shahih, objektif, akurat, serta hemat. desain

²⁸ Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA.

²⁹ Nazir, Moh. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

penelitian harus disusun dan dilaksanakan dengan penuh perhitungan agar dapat memperhatikan bukti empiris yang kuat relevansinya dengan pertanyaan penelitian. desain yang direncanakan dengan baik sangat membantu peneliti untuk mengadakan observasi dan intervensi serta untuk melakukan inferensi atau generalisasi hasil penelitian.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Data Primer dan data sekunder juga merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Meskipun pada hakekatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data namun berbeda cara memperolehnya. Untuk itu metode pengumpulan data harus sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan Apakah menggunakan data primer atau sekunder.

Menurut Sugiyono (2017;193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil obersvasi dari suatu objek, kejadian atau hasil

pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).³⁰

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

Sedangkan yang dimaksud data sekunder menurut Sugiyono (2017;193) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.³¹

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan

³⁰ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV.

³¹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer titik sedangkan kekurangan dari data sekunder adalah jika terjadi Sumber data kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³² Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, diantaranya :

1. Obsevasi

Menurut Riyanto(2010:96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.³³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan tentang Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:72) wawancara merupakan Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan

³² Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

³³ Adi, Rianto, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit

wawancara melalui tanya jawab antara peneliti dengan aparat yang terkait langsung dengan Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti apa yang disampaikan serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- a) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung pewawancara lah yang sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.
- b) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal memberi tanda v (*check*) pada nomor yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis melakukan suatu proses wawancara dengan

Anggota Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

3. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir (2013, h. 93) studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian di Polsek Lengkong, Jl. Talaga Bodas No. 35, Bandung, Jawa Barat dengan lamanya penelitian selama 4 (bulan), dimulai dari bulan April s/d Agustus 2019, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Jadwal dan Waktu Penelitian
Pada Bulan April s/d Agustus 2020

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.	Pengumpulan Judul T.A							
2.	Pengumpulan Data							
3.	Penyusunan Tugas Akhir							
4.	Seminar Draft							
5.	Sidang Tugas Akhir							

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Polsek Lengkong Kota Bandung

Berdasarkan KEP KAPOLRI nomor : KEP/366/VI/2020 tanggal 14 Juni 2010 tentang Validasi Polresta, kini Polrestabes Bandung jajaran ada 28 Polsek dan 1 Sub Sektor yang salah satu diantaranya adalah Polsek Lengkong Kota Bandung yang berada di Jl. Buah Batu No.193. Polsek Lengkong Kota Bandung membawahi 7 kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Burangrang
2. Kelurahan Malabar
3. Kelurahan Cikawao
4. Kelurahan Cijagra
5. Kelurahan Lingkar Selatan
6. Kelurahan Paledang
7. Kelurahan Turangga

Luas Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung adalah 574,15 Ha terdiri dari 1 kecamatan, 7 kelurahan, 65 RW dan 431 RT.

4.1.2 Kependudukan Wilayah Hukum Polsek Lengkong

Jumlah penduduk Kecamatan Lengkong sebanyak 64.831 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 31.905 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 32,926.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung di peroleh data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Lengkong dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lengkong

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	3.098	3.102	3.103
5-9	2.609	2.861	2.861
10-14	2.648	2.684	2.684
12-19	3.521	2.912	2.912
20-24	3.286	2.936	2.936
25-29	2.977	2.657	2.657
30-34	2.375	2.443	2.443
35-39	2.217	2.307	2.307
40-44	2.003	2.272	2.272
45-49	2.113	2.018	2.018
50-54	1.695	2.505	2.505
55-59	2.549	1.671	1.671
60-64	1.245	1.469	1.469
65+	938	1.088	1.088
Jumlah/Total	31.905	32.926	64.831

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2020

Adapun Aspek Astragatra Polsek Lengkong Kota Bandung, yaitu :

1. Luas Wilayah : 547,15 Ha
2. Jumlah Kelurahan : 7 Kelurahan
Rukun Warga (RW) : 65 RW
Rukun Tetangga (RT): 431 RT
3. Jumlah Penduduk
Laki-Laki : 31.905 Jiwa
Perempuan : 32.926 Jiwa
Jumlah : 64.831 Jiwa
4. Penduduk Menurut Kewarganegaraannya
WNI : 64.821 Jiwa
WNA : 10 Jiwa
5. Peribadatan
Mesjid : 79
Gereja : 12
Pura : 1
Vihara : 1
Kelenteng : -
6. Pendidikan
TK : 5
SD : 25
SLTP : 11
SLTA : 22

SPLB	: -
Pondok Pesantren	: 1
Universitas	: 15 Kampus
7. Kesehatan	
Rumah Sakit	: 1
Puskesmas	: 2
8. Hotel	: 57
9. Bank	: 40
10. SPBU	: 4
11. Outlet	: 1
12. Tempat Hiburan	: 32
13. Pangkalan Ojek	: 2
14. Instansi Terkait	
Pemerintahan	: 12
Swasta	: -
15. Pos Kamling	
Type A	: 18 Pos
Type B	: 28 Pos
Type C	: 25 Pos
16. Jumlah Satpam	: 258 Anggota
17. Jumlah Linmas	: 557 Anggota

4.1.3 Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung

Berikut adalah Peta Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung yang digambarkan pada gambar 4.1 dibawah ini :

Gambar 4.1
Peta Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung



Sumber : Polsek Lengkong Kota Bandung, 2020

Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan Peta Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung membawahi 7 Kelurahan yang terdiri dari:

1. Kelurahan Burangrang
2. Kelurahan Malabar
3. Kelurahan Cikawao
4. Kelurahan Cijagra
5. Kelurahan Lingkar Selatan

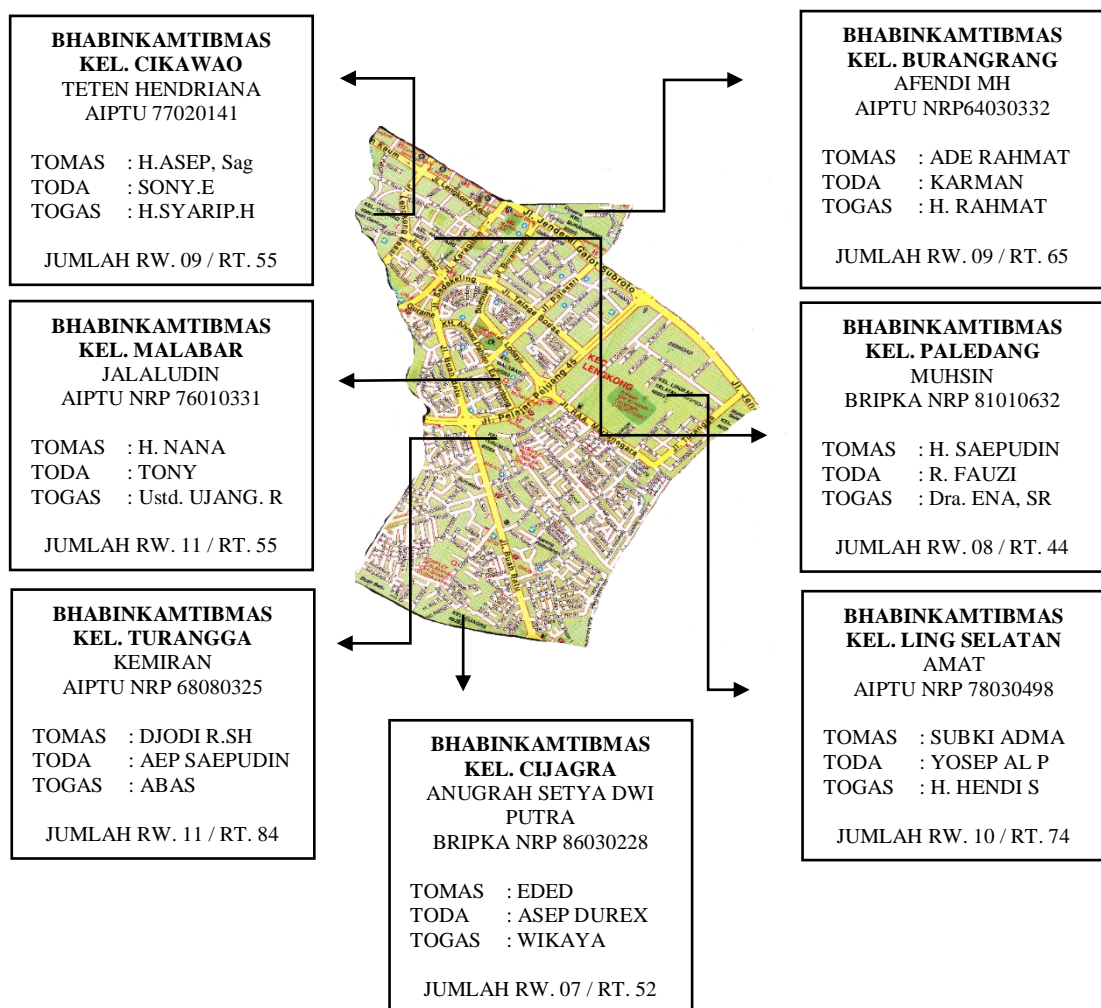
6. Kelurahan Paledang

7. Kelurahan Turangga

4.1.4 Peta Ploting Bhabinkamtibmas

Berikut adalah Peta Ploting Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung yang digambarkan pada gambar 4.2 dibawah ini :

Gambar 4.2
Peta Ploting Bhabinkamtibmas
Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung

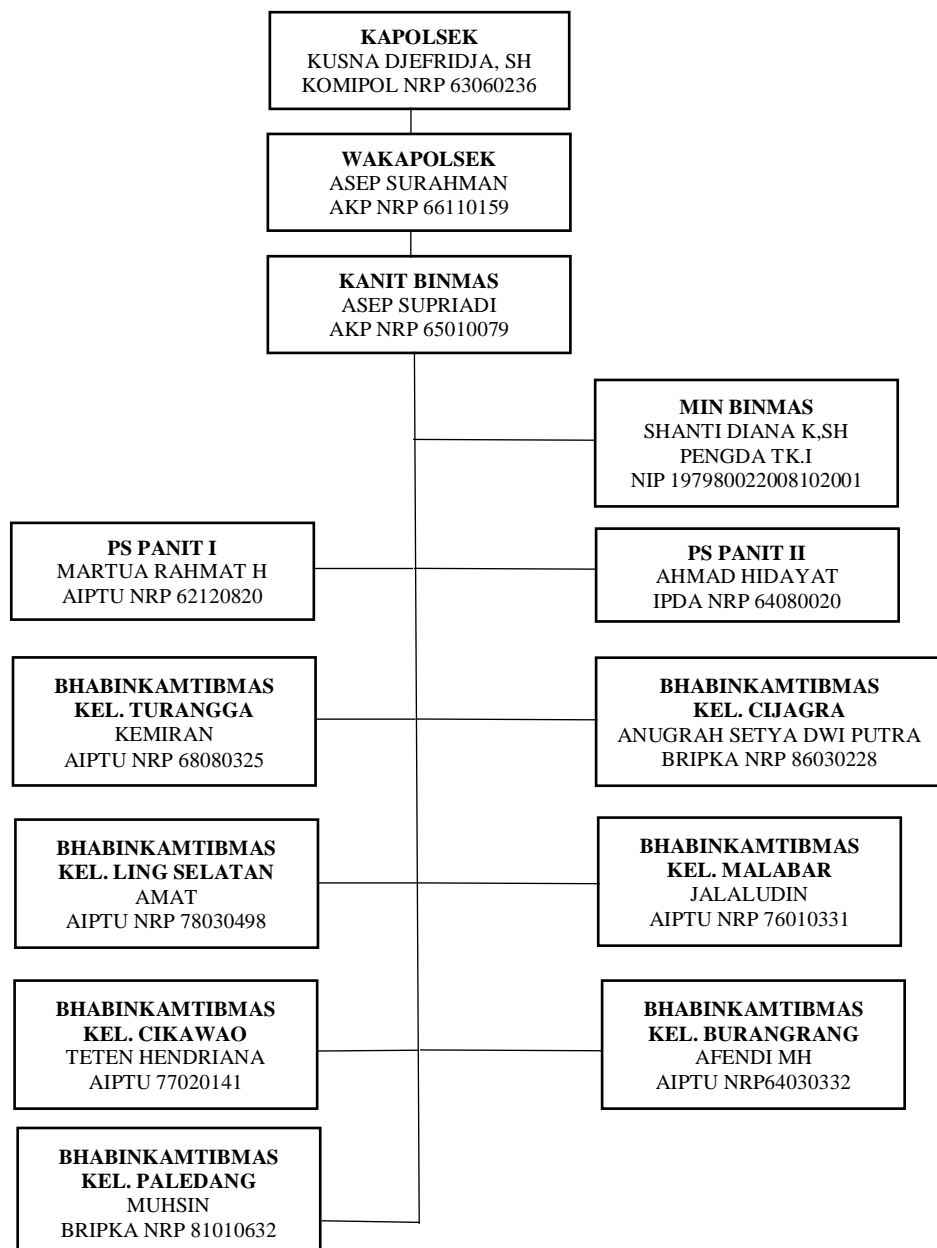


Sumber : Unit Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung, 2020

4.1.5 Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung



Sumber : Unit Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung, 2020

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7, bahwa susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang yang diatur dengan keputusan presiden Nomor 23/IX/2020 tanggal 30 September 2010.

Berdasarkan Struktur Organisasi pada gambar 4.1 diatas, menggambarkan kejelasan dari aparatur Polsek Lengkong Kota Bandung. Sehingga Unit Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung memiliki jumlah kekuatan sebanyak 11 personil yang terdiri dari :

1. Kanit Binmas : 1 Anggota Polri
2. Min Binmas : 1 Anggota PNS Polri
3. PS Panit I : 1 Anggota Polri
4. PS Panit I : 1 Anggota Polri
5. Bhabinkamtibmas
 - Kel. Turangga : 1 Anggota Polri
 - Kel. Cijagra : 1 Anggota Polri
 - Kel. Lingkar Selatan : 1 Anggota Polri
 - Kel. Malabar : 1 Anggota Polri
 - Kel. Cikawao : 1 Anggota Polri
 - Kel. Burangrang : 1 Anggota Polri
 - Kel. Paledang : 1 Anggota Polri

4.2 Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan publik. Kebijakan publik dilaksanakan dalam bentuk program-program oleh Pemerintah termasuk oleh Polri untuk mengatasi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Program Perpolisian Masyarakat adalah satu program yang dibuat Polri untuk mengatasi masalah kamtibmas sehingga dapat menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Tentunya untuk memelihara Kamtibmas Polisi tidak dapat bekerja sendiri, Polisi memerlukan partisipasi dari seluruh kalangan masyarakat untuk mampu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta Polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mampu menampilkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang menghormati Hak Asasi Manusia.

Dalam proses pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat, tidak lepas dari kinerja bhabinkamtibmas mengenai gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil tujuan dan target yang telah ditetapkan sehingga mampu menganalisis keberhasilan Program Perpolisian Masyarakat yang di laksanakan oleh Bhabinkamtibas.

Dalam proses analisis kinerja, merujuk pada model indikator kinerja menurut Mahsun yang didapat digunakan untuk mengukur kinerja

organisasi yaitu : indikator inputs, indikator proses, indikator outputs, dan indikator outcomes.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 55 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Ada Kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Polmas yaitu :

1. Intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat;
2. Keakraban hubungan petugas dengan masyarakat meningkat;
3. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat;
4. Intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat;
5. Kepekaan/ kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya meningkat;
6. Daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Kamtibmas meningkat;
7. Ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat;
8. Partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan kejadian meningkat;
9. Kemampuan masyarakat mengeleminir akar masalah meningkat;

10. Keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat;
11. Gangguan Kamtibmas menurun.

Adapun Kinerja Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat menurut IPDA Asep Saepudin (Kepala Unit Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung), 9 September 2020 beliau menyampaikan bahwa:

“Ketika Bhabinkamtibmas menjalankan tugasnya khususnya dalam penerapan POLMAS di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung itu cukup baik dimana dalam 7 kelurahan ini masing-masing ditugaskan 1 orang Bhabinkamtibmas yang mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat untuk menjalin kemitraan antara masyarakat dengan polri yaitu dengan cara melakukan pendekatan dengan semua lapisan masyarakat mulai dari tokoh agama, pemuda, komunitas, dan masyarakat lainnya guna mendukung program POLMAS ini sehingga Polri dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tentram dan tertib di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.”

Pernyataan Kanit Binmas tersebut ditegaskan oleh AIPTU AMAT Bhabinkamtibmas Kel. Lingkar Selatan, 9 September 2020 beliau menegaskan bahwa :

“Memang apa yang di katakan Pak Kanit tersebut benar adanya, saya sebagai Bhabinkamtibmas yang turun langsung ketengah-tengah masyarakat menyampaikan untuk memelihara kamtibmas dengan melakukan pendekatan keberbagai lapisan masyarakat dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, sehingga segala sesuatu apa yang kita rencanakan insyaallah masyarakat dukung dan hasilnya maksimal. Misalnya adanya pelaksanaan POS Kamling atau Ronda Malam itu salah satu bagian dari Perpolisian Masyarakat karena dengan adanya POS kamling ini dapat membantu tugas-tugas kita sebagai aparat kepolisian baik itu dari bidang keamanannya, bidang pengoordiniran wilayahnya, jadi setiap ada kejadian sekecil apapun mereka akan membantu menginformasikan kepada kita, sehingga kita aparat kepolisian dengan cepat dapat melakukan tindakan atas kejadian yang terjadi ditengah masyarakat itu.”

Fungsi Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan seperti :

1. Peningkatan intensitas kunjungan ke Kelurahan binaannya dan kegiatan-kegiatan warga seperti kerja bakti, ibadah bersama, melakukan penanaman pohon, menjadi tamu undangan untuk pelantikan RT, RW atau Ketua keamanan setempat, melayat dan lain-lain.
2. Melakukan dialog secara aktif dengan tokoh tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menggairahkan warga berperan serta dalam memelihara Kamtibmas.
3. Melakukan penyuluhan ke Satuan Pengamanan (Satpam), sekolah, kontrakan/kos-kosan dan lain-lain.
4. Melakukan penyuluhan kepada para pemuda, pelajar dan mahasiswa di wilayahnya tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba, minuman keras, pencurian , genk motor, bolos sekolah dan perkelahian serta pentingnya kesadaran menjadi polisi bagi diri mereka sendiri.

Menurut AIPTU Tenten Hendriana Bhabinkamtibmas Kelurahan Cikawao berpendapat tentang penerapan Perpolisian Masyarakat, 9 September 2020 beliau berpendapat :

“Adapun kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan adalah sulitnya memberdayakan masyarakat secara perorangan untuk mampu sukarela menjaga keamanan ketertiban di wilayahnya, ditambah dengan

kekurangannya sumber daya manusia (SDM) yang masih muda dan mau jadi petugas keamanan itu relatif sulit karena mungkin gengsi. Jadi rentan umur yang membantu aparat kepolisian dalam menjaga kamtibmas adalah 40-50 tahun yang kemungkinan pada saata kami memberikan himbauan atau penyuluhan bisa saja cepat lupa namun kami secara rutin tetap melakukan binluh atau kunjungan kegiatan masyarakat agar masyarakat khususnya yang berada di wilayah hukum polsek lengkong jadi merasa aman dari gangguan kamtibmas dan masyarakat jadi mau ikut berpartisipasi membantu polisi.”

Saeful Rosad salah satu warga Jl.Palasari No.7 RW 02 Kelurahan Lingkar Selatan, 9 September 2020 berpendapat bahwa :

“Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Lengkong Kota Bandung sering melakukan kunjungan kepada masyarakat atau menghadiri kegiatan masyarakat seperti siskamling/ronda malam dan melakukan himbauan tentang kamtibmas, jadi masyarakat merasa aman.”

Keberhasilan dari kegiatan-kegiatan dalam penerapan Perpolisian Masyarakat yang dilakukan oleh Unit Binmas khususnya Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung terlihat bahwa Polsek Lengkong Kota Bandung dapat meminimalisir terjadinya kenaikan tingkat kejahatan atau gangguan kamtibmas pada setiap tahunnya sehingga bisa terbilang menurun , berikut ini adalah tabel data yang menunjukkan tingkat kejahatan atau gangguan kamtibmas dari tahun 2019 sampai dengan 2020 dari bulan januari hingga bulan agustus.

Tabel 4.2
Data Rekapitulasi Kejahatan di Polsek Lengkong Kota Bandung
Tahun 2018, 2019, Januari s/d Agustus 2020

No.	Bulan	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Januari	11	9	3
2.	Februari	10	17	6
3.	Maret	16	7	12
4.	April	7	9	7
5.	Mei	9	7	7
6.	Juni	12	11	25
7.	Juli	9	8	10
8.	Agustus	12	5	6
9.	September	8	35	
10.	Oktober	12	18	
11.	November	6	12	
12.	Desember	47	16	
	Jumlah	159	154	76
	CT	74	78	41
	CC	85	76	53

Sumber : Rekrim Polsek Lengkong Kota Bandung, 2020

Keterangan :

CT : Crime Total

CC : Crime Clearance

Dari data diatas membuktikan bahwa kepolisian terus berupaya memaksimalkan semua fungsi kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas dalam penerapan program Perpolisian Masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat dan dengan intens memberikan pembinaan juga himbauan kepada masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban sehingga terwujudlah situasi aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

7.	Mengadakan pengamanan kebaktikan di geraja gereja	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Undangan	20	23	22	21	24	24	20	20	19	24	22	21
9	Kerja Bakti	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
10	Ibadah Bersama	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340

Sumber : Data Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung 2018

Berdasarkan dari tabel data kegiatan Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung pada tahun 2018, kegiatan yang sering dilaksanakan terlihat pada kegiatan ibadah bersama, melaksanakan penertiban parkir, menghadiri undangan dan melaksanakan penertiban warnet yang digunakan pelajar pada jam sekolah di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Tabel 4.4
Laporan Kegiatan Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung Tahun 2019

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Melaksanakan Binuh dan deteksi dini gembong teroris Santoso dan jaringan teroris lainnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Melaksanakan penertiban warnet yang digunakan pelajar pada jam sekolah	22	21	23	-	21	21	-	-	21	21	21	21
3.	Melaksanakan binuh satpam	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	Mengadakan penyuluhan kamtibmas	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1

	agar tidak terlibat geng motor dan bolos sekolah												
5.	Melaksanakan binluh kontrakan/kos-kosan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	Melaksanakan penertiban parkir yang ada di wilayah hukum Polsek Lengkong	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7.	Mengadakan pengamanan kebaktikan di gereja gereja	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Undangan	21	22	23	22	23	24	22	21	22	22	24	20
9	Kerja Bakti	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
10	Ibadah Bersama	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340

Sumber : Data Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung 2019

Berdasarkan dari tabel data kegiatan Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung pada tahun 2019, sama halnya dengan tahun 2018 kegiatan yang sering dilaksanakan terlihat pada kegiatan ibadah bersama, melaksanakan penertiban parkir, menghadiri undangan dan melaksanakan penertiban warnet yang digunakan pelajar pada jam sekolah di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Tabel 4.5
Laporan Kegiatan Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung Tahun 2020

No	Kegiatan	Bulan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aus
1.	Melaksanakan Binuh dan deteksi dini gembong teroris Santoso dan jaraingan teroris lainnya	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Melaksanakan penertiban warnet yang digunakan pelajar pada jam sekolah	20	22	21	-	20	21	-	-
3.	Melaksanakan binluh satpam	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	Mengadakan penyuluhan kamtibmas agar tidak terlibat geng motor dan bolos sekolah	1	1	1	-	1	1	-	-
5.	Melaksanakan binluh kontrakan/kos-kosan	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	Melaksanakan penertiban parkir yang ada di wilayah hukum Polsek Lengkong	25	25	25	25	25	25	25	25
7.	Mengadakan pengamanan kebaktikan di gereja gereja	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Undangan	24	22	23	22	24	23	22	21
9	Kerja Bakti	1	1	1	1	1	1	1	2
10	Ibadah Bersama	340	340	340	340	340	340	340	340

Sumber : Data Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung 2020

Berdasarkan dari tabel data kegiatan Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung pada tahun 2020 dari bulan Januari s/d Agustus , sama halnya dengan tahun 2017 dan 2018 namun kegiatan yang sering dilaksanakan meningkat terlihat pada kegiatan ibadah bersama, melaksanakan penertiban parkir, menghadiri undangan dan melaksanakan penertiban warnet yang digunakan pelajar pada jam sekolah di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Setelah dilakukan penelitian serta analisa ditemukan bahwa saat ini masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung merasa aman dengan hadirnya sosok Bhabinkamtibmas di wilayahnya, dengan adanya Bhabinkamtibmas yang membimbing, mendorong, menggerakkan serta menggerakkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam program Perpolisian Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban untuk dirinya sendiri dan masyarakat lain, sehingga masyarakat menjadi sadar akan ancaman dan gangguan kamtibmas di wilayahnya masing-masing.

4.3 Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung

Dalam melaksanakan penerapan Perpolisian Masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek

Lengkong Kota Bandung, Unit Binmas Khususnya Bhabinkamtibmas memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat.

4.3.1 Faktor Pendukung

4.3.1.1 Internal

Berikut ini adalah faktor pendukung yang ada pada Polri sebagai institusi yang meyangkut kelebihan atau kekuatan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan penerapan Program Perpolisian Masyarakat.

1. Adanya kebijakan atau keputusan Kapolri yang mengatur sinergi Bhabinkamtibmas terkait tujuan dan sasaran dalam penerapan Polmas, sudah diatur secara jelas dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Adanya Ketentuan atau kebijakan merupakan syarat penting dalam melakukan suatu aktifitas atau kinerja pada bidang-bidang khusus dan dengan adanya ketentuan atau kebijakan tersebut dapat dijadikan ukuran perencanaan terhadap penerapan suatu program,hal ini juga termasuk program Perpolisian Masyarakat

2. Tersedianya piranti lunak seperti buku-buku, petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan petunjuk lapangan dibidang operasional maupun pembinaan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi personil Polri khususnya Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya.
3. Dukungan Pemerintah setempat kepada Polri untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat tinggi, dukungan dalam penerapan program Perpolisian Masyarakat ini telah membuka peluang bagi kepolisian untuk mengembangkan kebijakan secara maksimal.
4. Personil Bhabinkamtibmas yang memiliki dasar keterampilan teknis di bidang Binmas dan melakukan inovasi atau terobosan yang baru diharapkan dapat mampu mengembangkan penerpaan program Perpolisian Masyarakat secara optimal.
5. Tersedianya lembaga Pendidikan Binmas atau lembaga-lembaga pendidikan Polri lainnya yang dapat digunakan sarana latihan untuk meningkatkan kemampuan personil dalam menjalankan tugasnya.

4.3.1.2 Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menyangkut kekuatan atau pendukung dari masyarakat kepada Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat adalah sebagai berikut ini.

1. Dukungan dan harapan masyarakat terhadap kehadiran Polri Meningkat, Penerapan Perpolisian Masyarakat khususnya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah binaannya sangat didukung oleh masyarakat, karena dianggap mewakili komitmen masyarakat dalam ikut aktif berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya.
2. Partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat yang selalu mendukung kepolisian dalam menjaga dan memelihara kamtibmas, sehingga Bhabinkamtibmas dapat memaksimalkan program Perpolisian Masyarakat.
3. Kepedulian masyarakat meningkat dengan ikut serta membantu tugas Bhabinkamtibmas dalam menjaga dan memelihara kamtibmas di wilayahnya yaitu dengan mengikuti siskamling atau ronda malam.
4. Partisipasi masyarakat meningkat, dengan pembinaan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas pada setiap daerah binaannya sehingga masyarakat mampu memahani permasalahan kamtibmas yang dihadapi dan dengan cepat memberikan laporan atau mengkonsultasikannya dengan aparat Kepolisian.
5. Tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya menjaga dan memelihara kamtibmas dengan mendukung program Perpolisian Masyarakat sebagai upaya untuk melindungi diri

dan lingkungannya dari ancaman pelaku kejahatan atau gangguan kamtibmas.

4.3.2 Faktor Penghambat

4.3.2.1 Internal

Adapun kendala atau faktor penghambat yang di hadapi Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung Bhabinkamtibmas dalam penerapan program Perpolisian Masyarakat, seperti tongkat T dan borgol untuk menunjang Pos Kamling.
2. Jarak tempat tinggal anggota Bhabinkamtibmas dengan daerah binaanya rata-rata cukup jauh dan itu dapat menghambat kinerja Bhabinkamtibmas apabila menerima laporan pada malam hari, sehingga Bhabinkamtibmas menempuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke tempat kejadian.
3. Masih adanya anggapan bahwa untuk menjalankan program Perpolisian Masyarakat itu hanya fungsi Binmas saja, sebenarnya semua anggota Polri dari semua fungsi baik itu fungsi Interlkam, Fungsi Reskrim, fungsi Lantas, fungsi Samapta dan Fungsi Binmas semua ikut serta dalam menjalankan program Perpolisian Masyarakat sehingga dapat terwujudnya kemitraan Polri dengan masyarakat yang optimal.

4. Kurangnya kuantitas personil Bhabinkamtibmas, seperti yang telah dijelaskan, bahwa jumlah personel Bhabinkamtibmas hanya 7 personel di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung , dengan wilayah yang cukup banyak penduduk total sebanyak 64.831 jiwa terdiri dari 31.905 laki-laki dan 32.926 perempuan, sehingga untuk melaksanakan program Perpolisian Masyarakat dengan jumlah 7 personel Bhabinkamtibmas dinilai sangat kurang memadai.

4.3.2.2 Faktor Eksternal

Adapun kendala atau faktor eksternal yang menghambat Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Tidak meratanya kemampuan dalam menciptakan sistem keamanan yang mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat
2. Ada sifat individualis dari beberapa masyarakat perkotaan yang membuat kurang pedulinya menjaga dan memelihara kamtibmas di lingkungannya.
3. Kualitas sumber daya manusia yang ikut berpartisipasi untuk pengoptimalan Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat salah satunya kegiatan siskamling atau ronda malam terbilang banyak yang dalam usia paruh baya umur 40-50 tahun, sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal.

4. Mengurangnya rasa gotong royong masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya secara sukarela, sebagian masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban itu mengharapkan upah atau imbalan.
5. Masih adanya masyarakat yang terbatas pengetahuannya tentang hukum dan keterbatasan pengetahuannya dalam pengelolaannya sistem keamanan dan ketertiban, sehingga sering kali terjadi tindakan mahin hakim sendiri dari masyarakat.

4.4 Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung

Keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam melakukan kemitraannya dengan masyarakat melalui program Perpolisian Masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada akhirnya akan terwujud dalam bentuk partisipasi masyarakat yang mendukung dan membantu sehingga dapat memaksimalkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Menurut IPDA Asep Saepudin (Kepala Unit Binmas Polsek Lengkong Kota Bandung), beliau menyampaikan bahwa :

“Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas khususnya dalam memaksimalkan penerapan Perpolisian Masyarakat telah kami lakukan salah satunya dengan upaya melakukan kunjungan kepada penduduk melalui program *door to door*, rutin melaksanakan binluh, memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memelihara kamtibmas dan memaksimalkan sarana prasana guna menunjang program kinerja kepolisian sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.”

Upaya lainnya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat adalah dengan memberikan respon yang serius terhadap segala bentuk masalah atau kejadian yang dilaporkan masyarakat dengan memberikan pelayanan Polri yang Profesional, Proposional, Prosudural, Proaktif, Progresif dan Produktif kepada semua lapisan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga membantu program yang telah Polri tetapkan seperti halnya program Perpolisian Masyarakat.

Untuk mencapai hasil yang optimal, maka program Perpolisian Masyarakat harus di laksanakan oleh semua anggota Kepolisian dari berbagai fungsi operasional Kepolisian, dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua instansi Pemerintahan, tokoh masyarakat, komunitas dan masih banyak lagi untuk memaksimalkan program yang telah dibuat, hal ini juga dapat mengoptimalkan penanganan masalah kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Selain itu ada upaya berikutnya yang dapat dilakukan yaitu komunikasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat di wilayah binaannya harus ditingkatkan, karena Bhabinkamtibmas dituntut harus mampu menjelaskan tentang konsep program Perpolisian Masyarakat kepada masyarakat dengan baik sehingga masyarakat mampu mengerti, memahami dan ikut berpartisipasi serta membantu kelancaran kepolisian dalam bertugas.

Adapun upaya lain yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desanya masing-masing.
- 2) Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi dan tukar pikiran tentang permasalahan Kamtibmas di Desa/ Kelurahan.
- 3) Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya.
- 4) Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat.
- 5) Melaksanakan penerangan atau himbauan secara langsung, melalui radio, televisi atau melalui sosial media lainnya.
- 6) Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri

dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.

- 7) Menyelesaikan konflik-konflik yang ada dimasyarakat melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution).

Dengan tindakan atau upaya-upaya yang telah diuraikan diatas diharapkan dapat memaksimalkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat khususnya di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung, sehingga kepolisian mampu menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat dan mampu meningkatkan kesadaran dan ikut berpartisipasi dalam menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaanya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kinerja Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - 1) Masukan (*input*), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Bhabinkamtibmas Polsek Lengkong Kota Bandung masih kekurangan sumber daya di beberapa bidangnya terutama sumber daya manusia, di bidang sarana dan prasarana seperti jumlah unit kendaraan dan alat penunjang lainnya untuk memaksimalkan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat di wilayah binaannya.
 - 2) Proses, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Bhabinkamtibmas Polsek Lengkong Kota Bandung dalam pelaksanaan penerapan Perpolisian

Masyarakat masih terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu memaksimalkan kinerja Kepolisian.

- 3) Keluaran (output) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat dan berbagai kegiatan yang dilakukan Polsek Lengkong Kota Bandung mampu meminimalisir kenaikan kejahatan atau gangguan kamtibmas pada setiap tahunnya.
 - 4) Hasil (outcome), berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa outcome yang dihasilkan oleh Bhabinkamtibmas melalui penerapan Perpolisi Masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung mampu memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binannya.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi Kinerja Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung yaitu, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya partisipasi sukarela dari masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas untuk menunjang kegiatan

program Perpolisian Masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

3. Upaya meningkatkan Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung, melalui upaya peningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan Bhabinkamtibas dan Kepolisian harus berupaya untuk mampu memberikan respon serius terhadap segala bentuk masalah atau kejadian yang dilaporkan masyarakat dengan memberikan pelayanan Polri yang Profesional, Proposional, Prosudural, Proaktif, Progresif dan Produktif kepada semua lapisan masyarakat. Mampu menyampaikan himbauan atau binaan dengan komunikasi yang baik dan mudah dimengerti, melakukan himbauan secara langsung melalui radio, televisi, dan sosial media lainnya. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga membantu program yang telah Polri tetapkan seperti program Perpolisian Masyarakat

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut.

1. Perlu adanya peningkatan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan peningkatan kegiatan yang dapat membantu memaksimalkan program Perpolisian Masyarakat yang lebih fokus kepada pembinaan, pelayanan, penyuluhan dalam

memecahkan masalah sehingga mampu menyadarkan masyarakat bawah pentingnya menjaga kamtibmas sehingga masyarakat bisa menganggap dirinya sebagai polisi bagi dirinya sendiri.

2. Meningkatkan sosialisasi dan dialog antara Kepolisian, Pemerintah Daerah (Kelurahan), dan kelembagaan masyarakat dari semua lapisan masyarakat tentang program Perpolisian Masyarakat dan persoalan kamtibmas.
3. Membuat dan meningkatkan forum kemitraan dengan masyarakat sehingga penerapan Perpolisian Masyarakat bisa dilaksanakan secara maksimal.